

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan kota yang pesat secara tidak langsung dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar-daerah. Hal ini disebabkan ada kecenderungan daerah yang mengalami pertumbuhan pesat biasanya memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap, seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja terampil. Kelengkapan fasilitas ini dapat terjadi sebagai hasil investasi swasta pada suatu kota atau merupakan hasil kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah tersebut berupa penetapan kota-kota tertentu menjadi suatu pusat pertumbuhan (growth center). Pusat pertumbuhan merupakan salah satu peran penting suatu kota. Beberapa peran kota, seperti pusat pengembangan ekonomi dan pusat pelayanan jasa wilayah secara langsung dan tidak langsung terkait dengan peran kota sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

Secara garis besar, terdapat tiga konsep utama pengembangan wilayah yang didasarkan pada penataan ruang, yaitu pusat pertumbuhan (growth pole), integrasi fungsional (functional integration), dan pendekatan desentralisasi (Alkadri, et al 2001). Konsep pertama, yaitu pusat pertumbuhan (growth pole). Konsep ini menekankan perlunya investasi terpusat pada suatu pusat pertumbuhan wilayah/kota yang telah mempunyai infrastruktur cukup baik. Konsep kedua, yaitu integrasi fungsional. Konsep ini merupakan suatu alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang sengaja dimunculkan di antara berbagai pusat pertumbuhan, karena adanya fungsi yang komplementer. Selain itu, konsep ini juga menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah lain. Konsep ini banyak dianut oleh para perencana kota di Indonesia, walaupun integrasi yang dilakukan bukan berdasarkan pada potensi produksi melainkan karena fungsi pemerintahan semata.

Konsep yang ketiga yaitu pendekatan desentralisasi. Konsep ini menekankan perlunya mencegah terjadinya aliran keluar (outflow) dari sumber

dana dan sumber daya manusia. Pertumbuhan yang terkonsentrasi di kota-kota besar, memunculkan gagasan untuk mempromosikan “desentralisasi” yang manifestasinya berupa penyebaran pembangunan melalui penanaman investasi ke pusat-pusat yang lebih rendah hirarkinya. Adanya konsep desentralisasi juga dapat menjadikan peran kota kecil atau sedang lebih mendapatkan perhatian.

Kebijakan penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah perlu dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat pusat maupun daerah yang di dalamnya berisi pembagian wilayah-wilayah sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Begitu juga halnya dengan Kabupaten Blora, dengan wilayah yang luas, membutuhkan suatu usaha pengembangan wilayah yang terintegrasi agar terjadi keseimbangan perkembangan antar-wilayah. Hal ini diwujudkan dengan menetapkan beberapa pusat pertumbuhan, antara lain Kota Cepu.

Kota Cepu merupakan kawasan yang penting dalam konstelasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Blora secara khusus dan Provinsi Jawa Tengah secara umum. Dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Kawasan Perkotaan Cepu merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

RTRW Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 juga menyebutkan bahwa kawasan perkotaan Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yakni kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Selain itu, dalam RTRW Kabupaten Blora juga disebutkan bahwa kawasan perkotaan Cepu merupakan kawasan strategis daerah terutama kawasan dengan pertumbuhan yang cepat.

Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Kota Cepu dapat dikatakan melebihi Kota Blora sebagai ibukota kabupaten. Apalagi dalam RTRW Kabupaten Blora tahun 2011-2031, seperti telah dikemukakan di atas, Kota Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang cakupan wilayah pelayanannya meliputi provinsi dan kabupaten di sekitarnya, sedangkan Kota Blora hanya ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang cakupan wilayah pelayanannya hanya sebatas kabupaten.

Dari uraian di atas, peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan menarik untuk diteliti, mengingat Kota Cepu merupakan ibukota kecamatan namun dalam RTRW Kabupaten Blora diposisikan lebih tinggi dari Kota Blora sebagai Ibukota Kabupaten Blora. Selain itu, Kota Cepu juga mempunyai PDRB perkapita terbesar di Kabupaten Blora.

1.2. Rumusan Masalah.

Sebagai pusat kegiatan wilayah, Kota Cepu diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap wilayah sekitarnya khususnya di Kabupaten Blora bagian timur, sehingga mampu berkembang sesuai dengan potensi masing-masing kota tersebut.

Pada perkembangannya, Kota Cepu lebih mempunyai daya tarik dibandingkan kecamatan lain di sekitarnya, seperti Kecamatan Sambong dan Kedungtuban, sehingga Kota Cepu terkesan berkembang sendiri. Dengan kata lain, perkembangan Kota Cepu dari ketersediaan fasilitas lebih lengkap bila dibandingkan kecamatan-kecamatan tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya pemusatan perkembangan kota, sehingga menimbulkan adanya penarikan sumber daya yang ada masuk ke Kota Cepu. Penarikan ini ditengarai menjadi penghambat perkembangan ibukota kecamatan di sekitarnya, karena minat masyarakat lebih memilih berinvestasi di Kota Cepu. Selain itu, berdasarkan RTRW Kabupaten Blora, struktur Kota Cepu lebih tinggi dari Kota Blora, karena Kota Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang cakupan wilayah pelayanannya berskala provinsi dan kabupaten di sekitarnya.

Dari sisi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, Kota Cepu memberikan andil yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Blora. Selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2013-2015, Kota Cepu mempunyai PDRB perkapita terbesar berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dibandingkan dengan Kota Blora sebagai Ibukota Kabupaten. Tingkat kesejahteraan masyarakat dicerminkan oleh pendapatan per-kapita, sedangkan kemampuan berkembang suatu wilayah ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). (Adisasmita, 2014:36) Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah menggambarkan potensi

ekonomi wilayah tersebut. Semakin besar nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan bahwa wilayah tersebut berpotensi secara ekonomi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini:

TABEL I.1
PDRB PERKAPITA KOTA BLORA DAN KOTA CEPU ATAS DASAR
HARGA BERLAKU & HARGA KONSTAN TAHUN 2013-2015
(JUTA RUPIAH)

No	Kota	2013		2014		2015	
		adhb	adhk	adhb	adhk	adhb	adhk
1.	Blora	24.537,39	21.643,41	27.458,70	22.606,19	29.986,90	23.715,71
2.	Cepu	49.226,24	44.240,97	56.311,84	46.631,99	59.952,26	50.337,48

Sumber: BPS Kabupaten Blora tahun 2016

Keterangan: adhb = atas dasar harga berlaku

adhk = atas dasar harga konstan

Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka menjadi menarik untuk diteliti seperti apa peran Kota Cepu terhadap pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Untuk melihat peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan khususnya di Kabupaten Blora, maka muncul pertanyaan penelitian “*Bagaimana peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora.*”

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kota Cepu sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora.

1.3.2 Sasaran Penelitian.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka beberapa sasaran penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengidentifikasi struktur perekonomian di Kabupaten Blora.
2. Mengidentifikasi hirarki kota-kota di Kabupaten Blora.
3. Mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Cepu.
4. Menganalisis peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora.
5. Merumuskan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan.

6. Merekomendasikan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi.

Ruang lingkup substansi membatasi materi bahasan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran penelitian. Adapun ruang lingkup substansi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Struktur perekonomian Kabupaten Blora; yang dimaksud adalah potensi perekonomian di Kabupaten Blora, Kota Cepu dan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Blora dilihat dari Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) untuk diketahui sektor basis.
- Hirarki kota adalah tingkatan kota yang menunjukkan tingkat pelayanan kota, dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, jumlah fasilitas, dan tingkat aksesibilitas.
- Wilayah pengaruh adalah wilayah yang mempunyai interaksi keruangan besar terhadap suatu kota yang diindikasikan dengan nilai analisis gravitasi dan titik henti (Breaking Point).
- Peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan; yang dimaksud adalah deskripsi peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan dengan menganalisis hasil-hasil identifikasi dari struktur perekonomian, hirarki kota, dan wilayah pengaruh, dengan analisis deskriptif.
- Merumuskan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan; diuraikan dalam sintesa analisis untuk penentuan peran Kota Cepu.
- Merekomendasikan peran Kota Cepu; diuraikan dalam sintesa hasil analisis sebagai upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora agar peran Kota Cepu dapat optimal.

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah.

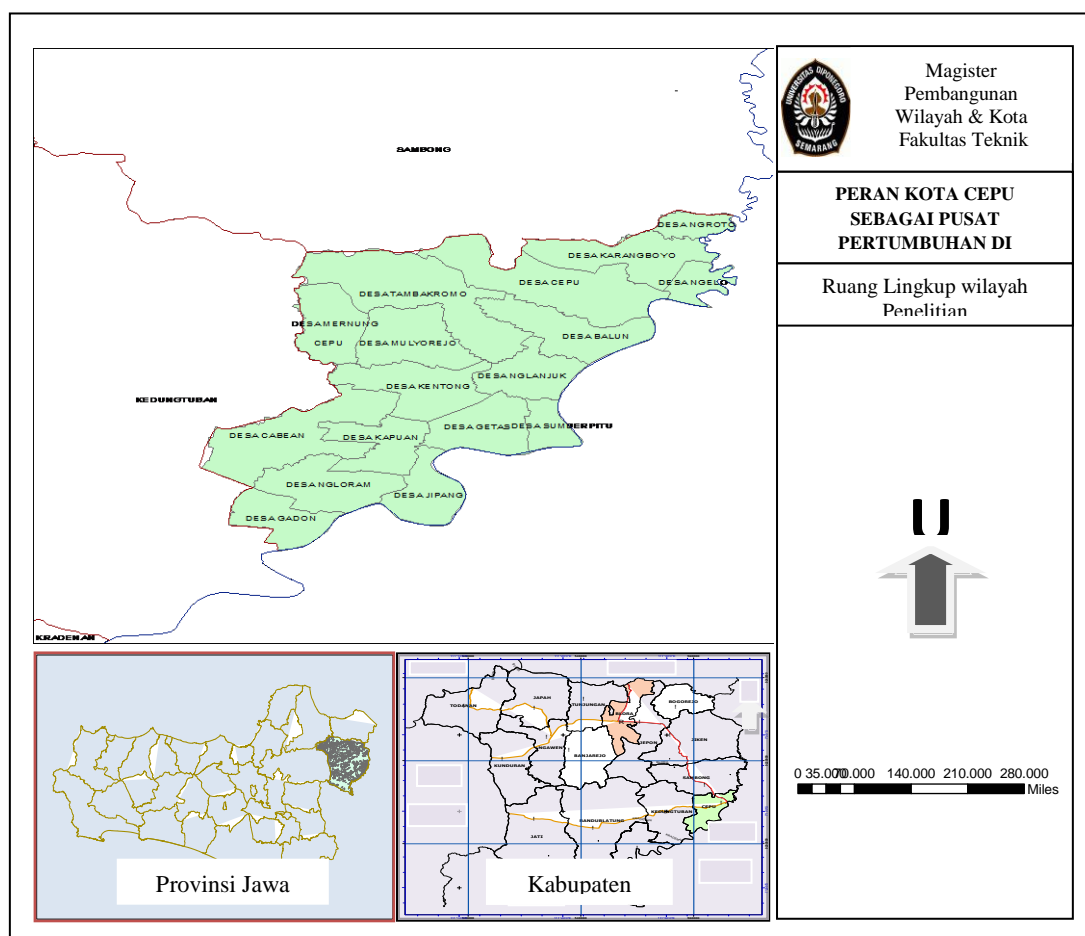
Ruang lingkup wilayah adalah batasan wilayah penelitian. Hal ini dilakukan untuk membatasi wilayah penelitian karena keterbatasan waktu dan tenaga. Adapun ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Wilayah Makro:

Secara makro, ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kabupaten Blora, sebagai unit analisis untuk melihat struktur perekonomian dan penentuan hirarki kota. Adapun pelibatan kabupaten lain hanya sebatas informasi pembanding saja tanpa uraian lebih mendalam. Selain Kabupaten Blora secara keseluruhan, penelitian ini juga menjadikan Kota Blora sebagai acuan pembanding terhadap Kota Cepu untuk melihat wilayah pengaruh antar-kota. Adapun penyebutan Kota Blora dan Kota Cepu tidak dibatasi oleh wilayah administrasi berupa kelurahan, tetapi mencakup seluruh wilayah kecamatan.

- Wilayah Mikro:

Secara mikro, ruang lingkup wilayah penelitian ini adalah Kota Cepu sebagai unit analisis untuk mengukur besarnya pengaruh dan melihat perannya sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora.



Sumber: Data Sekunder

GAMBAR 1.1
PETA WILAYAH PENELITIAN

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan tentunya berkaitan dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam menentukan pusat-pusat pertumbuhan di suatu wilayah, dengan melihat potensi dan daya dukung wilayah tersebut.

1.5.2. Manfaat Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian yang akan dilakukan juga memberikan manfaat penelitian secara praktis. Selain bermanfaat dalam melihat peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengoptimalkan wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan, sehingga dapat mengembangkan kota-kota lain di sekitarnya.

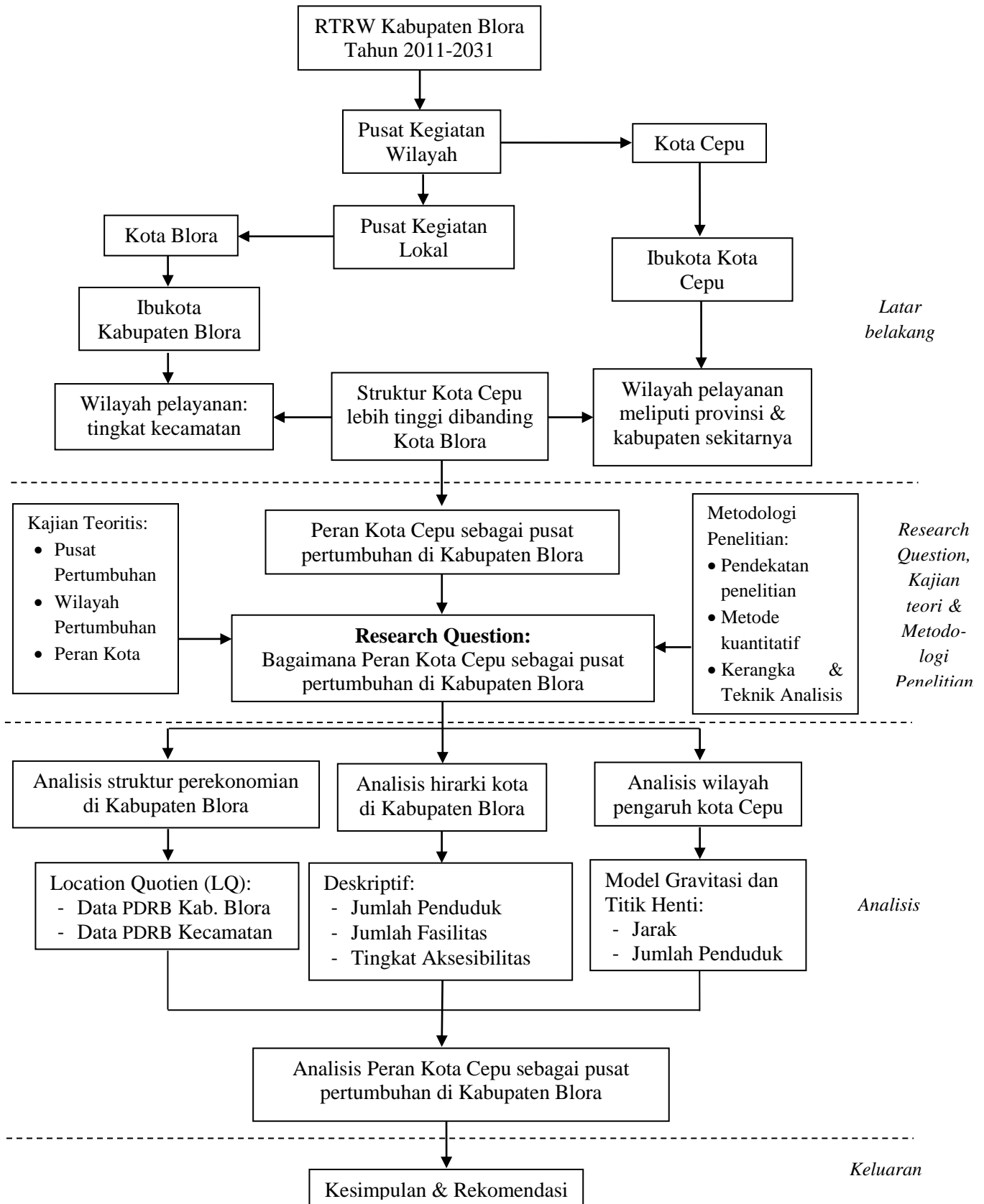
1.6. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan RTRW Kabupaten Blora tahun 2011–2031, Kota Cepu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan cakupan wilayah pelayanan meliputi provinsi dan kabupaten di sekitarnya. Sedangkan Kota Blora ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan cakupan wilayah pelayanan pada tingkat kabupaten. Ini menunjukkan bahwa struktur Kota Cepu sebagai ibukota kecamatan, berada di atas Kota Blora sebagai ibukota kabupaten. Hal ini menarik untuk diteliti berkaitan dengan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora, dimana secara struktur kotanya mempunyai posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Blora sebagai ibukota kabupaten. Besarnya PDRB Perkapita Kota Cepu dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Blora, menambah menarik untuk meneliti perannya sebagai pusat pertumbuhan.

Dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora. Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan penelitian ini adalah: (1)

mengidentifikasi struktur perekonomian di Kabupaten Blora; (2) mengidentifikasi hirarki kota-kota di Kabupaten Blora; (3) mengidentifikasi wilayah pengaruh Kota Cepu; (4) menganalisis peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora; (5) Merumuskan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan; (6) Merekomendasikan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Blora.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka untuk mengetahui struktur perekonomian di Kabupaten Blora digunakan analisis Location Quotient (LQ), untuk mengetahui hirarki Kota Cepu dan kota-kota lainnya di Kabupaten Blora dengan analisis Deskriptif (Jumlah penduduk, Skallogram & Indeks Sentralitas Terbobot, tingkat aksesibilitas), untuk mengetahui wilayah pengaruh Kota Cepu dengan menggunakan Model Gravitasi dan Titik Henti (BP). Dari ketiga identifikasi tersebut maka dapat dianalisis peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Blora. Setelah tahapan analisis, selanjutnya merumuskan peran Kota Cepu, dan merekomendasikan peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan. Selanjutnya diuraikan kesimpulan penelitian, dan rekomendasi penelitian sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk perbaikan ke arah yang lebih baik. Kerangka pemikiran penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1.2.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7. Keaslian Penelitian.

Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan dan membahas tentang hal yang sejalan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- Peran Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Potensi Sumberdaya Alam Kota Cepu terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Kabupaten Blora, ditulis oleh Eko Syawaludin (2003). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keberadaan potensi sumberdaya alam terhadap ketimpangan antarwilayah kecamatan di kabupaten Blora. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah pada penelitian ini, lebih menekankan kepada peran Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya.
- Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang, ditulis oleh Dita Hestuadiputri (2007). Tujuan penelitiannya adalah mengkaji peran dan fungsi Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lasem sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Rembang, hampir sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terletak pada alat analisis yang digunakan, metodologi, dan lokasi penelitian.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel keaslian penelitian di bawah ini:

TABEL 1.2
KEASLIAN PENELITIAN

Nama / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
Eko Syawaludin/2003	Peran Perkembangan Perekonomian Wilayah dan Potensi Sumberdaya Alam Kota Cepu terhadap Ketimpangan Antarwilayah di Kabupaten Blora	Mengetahui peran keberadaan potensi sumberdaya alam terhadap ketimpangan antarwilayah kecamatan di kabupaten Blora	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Indeks Williamson • Koefisien Korelasi Pearson • Regresi Linier 	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Blora dan Kota Cepu • Identifikasi ketimpangan perkembangan antarkecamatan di Kabupaten Blora
Dita Hestuadiputri/2007	Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem sebagai Pusat	Mengkaji peran dan fungsi Ibu Kota Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif • Kuantitatif • Mean Centre & Standard 	Peran & fungsi IKK Lasem sebagai pusat per-tumbuhan di Kabupaten Rembang

Nama / Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Pertumbuhan di Kabupaten Rembang	(IKK) Lasem sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Rembang	Distance • Statistik Deskriptif • Sosiogram • Indeks Sentralitas Terbobot	
Firmansyah/ 2017	Peran Kota Cepu sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Blora	Mengkaji peran Kota Cepu sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Blora	• Location Quotient & Indeks Sentralitas Terbobot • Gravitasi & Titik Henti (BP) • Deskriptif Kuantitatif	• Struktur perekonomian di Kabupaten Blora • Hirarki kota-kota di Kabupaten Blora • Wilayah pengaruh Kota Cepu • Kedudukan Kota Cepu sebagai pusat pertumbuhan di Kabupaten Blora

Sumber: Analisis Penyusun, 2017

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah positivistik. Untuk menentukan variabel, parameter, dan tolok ukur dalam penelitian ini digunakan teori-teori yang berkaitan dan banyak diterapkan dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota. Disamping itu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dan bertujuan menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

1.8.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2016). Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasil penelitian tersebut untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi suatu masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui menjadi tahu (paham), memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.

Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder dilengkapi wawancara dengan pihak terkait. Alat analisis yang digunakan adalah: Location Quotient (LQ), Deskriptif kuantitatif, serta Model Gravitasi dan Titik Henti (Breaking Point). Pada penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk mengukur data berupa angka. Data-data yang dibutuhkan merupakan data sekunder yang akan diperoleh melalui pengumpulan data-data yang ada pada lembaga-lembaga terkait, antara lain Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora, Bappeda Kabupaten Blora, serta instansi-instansi terkait. Selain itu, dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora dan Sekretaris Camat Cepu.

1.8.3 Kebutuhan Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dilengkapi wawancara dengan pihak terkait. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tulisan-tulisan, seperti buku, laporan, peraturan-peraturan, dokumen, dan sebagainya. Wawancara dilakukan sebagai tolok ukur dan penguatan dari hasil analisis data sekunder. Data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL I.3.
KEBUTUHAN DATA

No	Kebutuhan Data	Unit Data	Jenis Data	Analisis	Kegunaan	Sumber Data	Tahun
1.	Data PDRB Kab. Blora & kecamatan	Kabupaten	Sekunder	Location Quotient(LQ)	Identifikasi struktur perekonomian-an di Kab. Blora	BPS	2016
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk • Jumlah fasilitas • Tingkat aksesibilitas 	Kabupaten	Sekunder	Deskriptif Kuantitatif; Skalogram & Indeks Sentralitas Terbobot	Menentukan hirarki kota	BPS, Bappeda	2016
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Jarak 	Kabupaten	Sekunder	Model Gravitasi dan Titik Henti (BP)	Menentukan wilayah pengaruh	Bappeda	2016
4	Pertumbuhan	Kecamatan	Primer	Wawancara	Tolok ukur	Kepala	2017

No	Kebutuhan Data	Unit Data	Jenis Data	Analisis	Kegunaan	Sumber Data	Tahun
	Kota Cepu	matan			analisis data	DPUPR, Sekretaris Camat Cepu	

Sumber: Hasil analisis, 2017

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

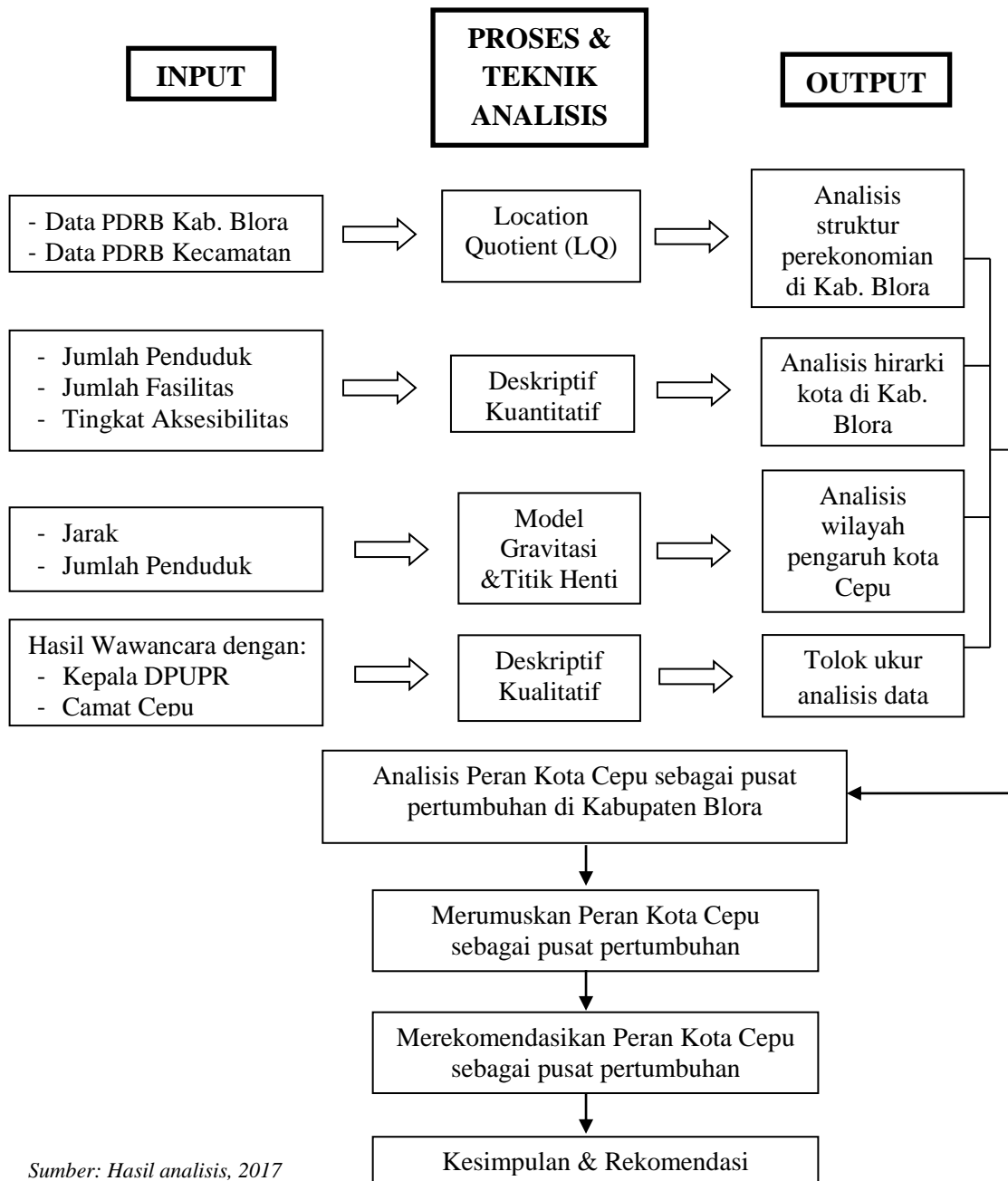
Tahap pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya yang nantinya akan digunakan dalam tahap analisis data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan wawancara dengan pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan sebagai variabel dalam penelitian ini dari instansi-instansi terkait. Data yang telah didapat, selanjutnya diolah dalam bentuk tabel-tabel hasil kompilasi data sekunder sehingga didapatkan kumpulan data yang siap dianalisis. Selain itu, diperkuat dengan hasil wawancara terkait dengan tema pembahasan, sehingga hasil analisis data sekunder yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sesuai realita di lapangan.

1.8.5 Kerangka dan Teknik Analisis

1.8.5.1 Kerangka Analisis

Kerangka analisis merupakan gambaran proses analisis data yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Rangkaian kerangka analisis terdiri dari input, proses, dan output. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

1.8.5.2 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis: Location Quotient (LQ), Deskriptif Kuantitatif, Model Gravitasi dan Titik Henti (BP). Alat analisis tersebut digunakan untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dan sasaran penelitian sebagai berikut:

1. Identifikasi struktur perekonomian di Kabupaten Blora.

Identifikasi struktur perekonomian di Kabupaten Blora dilihat berdasarkan tipologi ekonomi wilayah, yaitu dengan menggunakan teknik analisis Location Quotient (LQ). Teknik ini banyak digunakan sebagai alat analisis untuk mengukur spesialisasi relatif suatu daerah pada sektor-sektor tertentu. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan di suatu daerah pada sektor-sektor tertentu yang merupakan sektor basis atau sektor leading. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah sektor-sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu data PDRB Kota Cepu (dan kecamatan lainnya sebagai tolok ukur) serta data PDRB Kabupaten Blora sebagai wilayah acuan. Formula untuk menghitung LQ menggunakan rumus sebagai berikut: (Warpani, 1984:68)

$$LQ = \frac{Si / S}{Ni / N}$$

dimana:

- Si : PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah yang diteliti.
- S : Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan ekonomi di daerah yang diteliti.
- Ni : Jumlah PDRB sektor kegiatan ekonomi i di daerah acuan yang lebih luas.
- N : Jumlah PDRB seluruh sektor kegiatan di daerah acuan yang lebih luas.

Dari hasil perhitungan LQ tersebut ada tiga kemungkinan hasil yang diperoleh, yaitu:

- $LQ > 1$, disebut sektor basis, artinya kota tersebut memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi lebih tinggi dari daerah acuan.
- $LQ < 1$, disebut sektor non-basis, artinya kota tersebut tidak memiliki potensi ekspor dalam sektor tersebut dan tingkat spesialisasinya lebih rendah dari daerah acuan.
- $LQ = 1$, artinya kota tersebut mencukupi dalam sektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan daerah acuan.

2. Menentukan Hirarki Kota.

Untuk menentukan hirarki kota, digunakan teknik analisis Deskriptif Kuantitatif dengan menggabungkan hasil analisis dari variabel yang digunakan. Variabel tersebut adalah jumlah penduduk, banyaknya fasilitas, dan tingkat aksesibilitas. Berikut ini penjelasan teknik analisis untuk masing-masing variabel tersebut beserta cara analisisnya.

a. Jumlah penduduk.

Jumlah penduduk digunakan untuk menentukan tingkatan kelas dengan interval tertentu.

Untuk menentukan jumlah kelas, menggunakan rumus Sturges, yaitu:

$$k = 1 + 3,3 \log n$$

dimana:

k = jumlah kelas
n = banyaknya kota

Kemudian menentukan interval kelas dengan formula:

$$I = \frac{X - Y}{k}$$

dimana:

I = interval kelas
X = jumlah penduduk terbesar
Y = jumlah penduduk terkecil
k = jumlah kelas

Penentuan banyaknya jumlah kelas ini juga digunakan untuk dua variabel lainnya.

b. Banyaknya fasilitas.

Untuk menentukan hirarki kota dari segi banyaknya fasilitas, digunakan dua teknik analisis yaitu, metode Skalogram dan Indeks Sentralitas Terbobot. Penggunaan teknik analisis ini dengan pertimbangan bahwa terdapat pendekatan yang berbeda, sehingga hasil akhirnya dapat diperbandingkan. Persamaan kedua

teknik analisis ini adalah menghasilkan hirarki kota serta sebaran fasilitas pelayanan kotanya.

▪ ***Metode Skalogram.***

Metode Skalogram merupakan pendekatan yang didasarkan atas kelengkapan jenis fasilitas pelayanan suatu kota. Teknik analisis ini menggunakan matrik data dasar yang berisikan variabel-variabel fasilitas. Hasil akhir yang diperoleh berupa peringkat kota-kota menurut kelengkapan fasilitasnya.

Metode Skalogram diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Membuat urutan kota berdasarkan jumlah penduduk pada sebelah kiri tabel kerja.
2. Membuat urutan fasilitas berdasarkan frekuensi.
3. Memberi tanda (1) pada keberadaan suatu fasilitas dan (0) untuk ketiadaan fasilitas.
4. Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi kelengkapan fasilitas suatu kota dan jumlah fasilitas yang ada pada setiap kota.
5. Menyusun hirarki kota berdasarkan peringkat kelengkapan fasilitas.

Jenis-jenis fasilitas yang akan digunakan sebagai variabel, dipilih dari beberapa jenis fasilitas dengan kriteria sebagai berikut (Rondinelli, 1985):

- (1) Mencirikan fasilitas perkotaan (urban)
- (2) Berskala luas
- (3) Berfungsi secara sosial maupun ekonomi
- (4) Obyek tunggal dan terukur
- (5) Memiliki karakteristik yang berjenjang atau hirarkis

Berdasarkan kriteria umum tersebut dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Blora, maka untuk analisis Skalogram ini digunakan 35 jenis fungsi pelayanan, yaitu:

- (1) Fasilitas Pemerintahan;
 - ❖ Kantor Pemerintah Daerah
- (2) Fasilitas Lembaga Keuangan;
 - ❖ Bank Umum,
 - ❖ Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Bank Kredit Kecamatan (BKK)
- (3) Fasilitas Ekonomi;
 - ❖ Pasar Permanen,

- ❖ Pasar Non-permanen,
 - ❖ Pasar Hewan,
 - ❖ Rumah Potong Hewan (RPH),
 - ❖ Supermarket,
 - ❖ Koperasi Unit Desa,
 - ❖ Industri,
 - ❖ Hotel,
- (4) Fasilitas Pendidikan;
- ❖ Taman Kanak-kanak (TK)/RA
 - ❖ Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtida'iyah (MI)
 - ❖ Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)
 - ❖ SMU/SMK/Madrasah Aliyah
 - ❖ Akademi/Perguruan Tinggi
- (5) Fasilitas Kesehatan;
- ❖ Rumah Sakit (RS)
 - ❖ Rumah Bersalin
 - ❖ Balai pengobatan/Balai Kesehatan
 - ❖ Puskesmas
 - ❖ Puskesmas Pembantu
 - ❖ Praktik Dokter
 - ❖ Praktik Bidan/Perawat
 - ❖ Apotek
 - ❖ Toko Obat
 - ❖ Posyandu
- (6) Fasilitas Transportasi Komunikasi;
- ❖ Terminal
 - ❖ Stasiun KA
 - ❖ Kantor Pos
 - ❖ Warnet
- (7) Fasilitas Ibadah;
- ❖ Masjid
 - ❖ Musholla
 - ❖ Gereja

- ❖ Wihara
- ❖ Klenteng

▪ ***Indeks Sentralitas Terbobot.***

Teknik analisis ini memanfaatkan Metode Skalogram dengan menggunakan pendekatan terhadap bobot masing-masing jenis fasilitas. Penggunaan Metode Skalogram sedikit dimodifikasi yaitu dengan mencantumkan besarnya jumlah fasilitas pada setiap jenis fasilitas tersebut, sehingga didapat hasil akhir berupa peringkat kota yang berurutan dari kota dengan indeks sentralitas terbesar hingga terkecil.

Metode ini melakukan dua jenis pembobotan (Muta'ali, 2015), yaitu:

- (a) Pembobotan terhadap jenis fasilitas, yang disebut sebagai nilai sentralitas gabungan. Dalam pembobotan ini digunakan asumsi bahwa nilai sentralitas gabungan setiap jenis fasilitas dianggap sama. Pada penelitian ini, nilai sentralitas gabungan dipilih nilai 100.
- (b) Pembobotan terhadap jumlah unit fasilitas (C), yang disebut sebagai nilai sentralitas fasilitas, dengan rumus sebagai berikut (Marshall, 1986):

$$C = \frac{x}{X}$$

dimana:

- C = Bobot atribut fungsi x
 x = Nilai sentralitas gabungan (=100)
 X = Jumlah total atribut dalam sistem

c. ***Tingkat Aksesibilitas.***

Untuk mengukur tingkat aksesibilitas digunakan rumus sebagai berikut:

$$T_{ij} = \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^b} \cdot f(Z_i)$$

dimana:

- T_{ij} = Tingkat aksesibilitas dari kota i ke kota j

- P_i = Penduduk kota i (kota acuan)
 P_j = Penduduk kota j (kota lain di wilayah Kab. Blora)
 d_{ij} = Jarak dari kota i ke kota j
 b = Pangkat dari d (digunakan $b=2$)
 $f(Z_i)$ = Fungsi Z_i , dimana Z_i adalah ukuran daya tarik kota i.
 (dalam hal ini menggunakan banyaknya jumlah fasilitas di kota tersebut)

Dengan menggunakan rumus di atas, maka aksesibilitas (T_{ij}) tiap kota dapat dihitung. Kemudian diurutkan mulai dari T_{ij} tertinggi ke T_{ij} terendah. Urutan kota dibagi dalam kelas dengan interval yang sama. Jumlah kelas sama seperti dalam analisis jumlah penduduk.

Setelah kelas kota untuk semua variabel diketahui, maka kelas untuk tiap kota digabung dan dicari rata-ratanya per-kota. Nilai rata-rata tiap kota diurutkan dari yang tertinggi ke yang terendah, kemudian dibagi dalam kelas yang jumlahnya sama seperti jumlah terdahulu. Kota yang berada pada kelas 1 dinyatakan sebagai kota orde I. Kota yang berada pada kelas 2 dinyatakan sebagai kota orde II, dan seterusnya.

Dengan metode ini, kita dapat mengetahui hirarki suatu kota dan juga dapat mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan tiap kota pada posisi orde yang dimilikinya.

3. Analisis Wilayah Pengaruh.

Untuk mengetahui wilayah pengaruh, analisis yang digunakan adalah model Gravitasi dan Titik henti (BP). Analisis wilayah pengaruh digunakan untuk mengukur luasan pengaruh wilayah.

(1) Model Gravitasi.

Model gravitasi bertujuan untuk mengetahui hubungan kedekatan antara wilayah satu dengan wilayah di sekitarnya. Dalam hal ini, daerah dianggap sebagai suatu massa yang mempunyai daya tarik menarik, sehingga akan muncul hubungan saling mempengaruhi antara kedua daerah tersebut. Kelemahan utama model gravitasi adalah mengabaikan heterogenitas penduduk masing-masing kota yang diteliti, seperti perbedaan struktur umur penduduk, pekerjaan, dan kebiasaan penduduknya. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut (Bintarto, 1982):

$$I_{1,2} = a \frac{P_1.P_2}{J^b_{1,2}}$$

dimana;

$I_{1.2}$	= Interaksi dalam ruang antara wilayah 1 dan 2
P_1	= Jumlah penduduk wilayah 1
P_2	= Jumlah penduduk wilayah 2
$J_{1.2}^b$	= Jarak antara wilayah 1 dan 2
a	= Konstante empirik yang besarnya 1
b	= Konstante empirik yang besarnya 2

Penggunaan rumus ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu:

- 1) Seluruh daerah merupakan dataran yang homogen (isotop) dalam hal topografi, iklim, dan perkembangan ekonominya.
- 2) Kedua kota mempunyai tingkat kemudahan pencapaian yang sama.
- 3) Faktor jarak menjadi faktor penentu besarnya biaya untuk berpindahnya orang, barang dan informasi, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain seperti waktu perjalanan dan jenis transportasi yang digunakan.

Dengan kelemahan-kelemahan tersebut, model gravitasi tidak dapat menggambarkan besarnya interaksi yang nyata, tetapi hanya mengindikasikan besarnya interaksi tersebut.

(2) *Model Titik Henti (Breaking Point)*.

Model titik henti (Breaking Point) digunakan untuk mencari batas wilayah pengaruh masing-masing kota. Model ini pada prinsipnya mencari jarak antara dua kota untuk diketahui jangkauan pelayanan maksimal, dalam hal ini terutama untuk kegiatan perdagangan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Hartshorn,dkk, 1988):

$$\mathbf{BP} = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{1 + \sqrt{(Pend. Z / Pend. Y)}}$$

dimana;

BP	= Breaking Point
d	= Jarak antara kedua kota
Pend. Z	= Penduduk kota yang lebih besar
Pend. Y	= Penduduk kota yang lebih kecil

Kelemahan model ini sama dengan model gravitasi, yaitu mengabaikan heterogenitas karakteristik penduduk dan hanya menggunakan faktor jarak

sebagai penentu batas wilayah pengaruh kota. Dengan demikian hasil yang diperoleh dari penerapan rumus ini masih bersifat indikatif saja.

1.9. Sistematika Pembahasan.

Penyusunan pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian teori, bab gambaran umum wilayah studi, bab hasil dan pembahasan serta bab kesimpulan dan rekomendasi. Berikut adalah penjelasan dari setiap bab di penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup substansi dan wilayah, manfaat penelitian secara teoritis dan secara praktis, kerangka pikir, keaslian penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI: PERAN KOTA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN

Bab kajian teori menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian ini. Literatur yang dikaji mencakup beberapa hal, yaitu: peran dan sistem kota, wilayah dan pertumbuhan wilayah, dan peran kota dalam pengembangan wilayah.

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI

Bab gambaran wilayah studi berisi gambaran wilayah di Kabupaten Blora, Kota Blora, dan Kota Cepu yang memperlihatkan data-data sebagai pendukung analisis berupa data penduduk, jarak, PDRB, sarana dan prasarana, dan data lain yang diperlukan.

BAB IV ANALISIS PERAN KOTA CEPU SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN DI KABUPATEN BLORA

Bab ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan variabel yang digunakan dan data yang telah dianalisis.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab Kesimpulan dan Rekomendasi berisi rangkuman dan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pemberian rekomendasi kepada pihak pemerintah daerah untuk perbaikan dan peningkatan di kemudian hari.